PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat-Nya sehingga penyusunan buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga nantinya buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan informasi tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan terhadap program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan ke depan. Perencanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan analisa dan evaluasi merupakan dokumen yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya. DPMPTSP Kabupaten Kediri merupakan salah satu unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Kediri yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

Demikian dapatnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Kediri ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Guna kesempurnaan laporan ini, diharapkan adanya masukan dan koreksi positif.

Kediri, - - 2025
KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN KEDIRI

JOKO SUWONO
NIP. 19750103 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi 2
1.1.2 Susunan Organisasi 2
1.1.3 Visi dan Misi 5
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... **11**
2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 20
2.3 Reviu terhadap Perubahan RKPD 22
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **29**
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD 29
3.1.1 Tujuan 29
3.1.2 Sasaran 30
3.2 Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024 30

BAB IV : PENUTUP **36**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sehubungan hal tersebut sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya dan disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Pasal 11 ayat (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Renstra Perangkat Daerah; dan
b. Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan kerja sebagaimana telah disusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Dalam prosesnya rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Rancangan Renja SKPD tersebut kemudian akan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan awal RKPD.

1.1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

❒ ***Tugas Pokok***

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

❒ ***Fungsi***

Dalam melaksanakan tugas pokoknya DPMPTSP Kabupaten Kediri, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
f. pembinaan penyelenggaraan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
g. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

1.1.2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, terdiri atas:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)



SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG DIMILIKI

Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri per 31 Maret 2024 sebanyak 26 orang, berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan, terdiri dari:
   - ❖ Pegawai Golongan IV : 8 Orang
   - ❖ Pegawai Golongan III : 11 Orang
   - ❖ Pegawai Golongan II : - Orang
   - ❖ Pegawai Golongan I : - Orang
   - ❖ Non PNS / Honorer : 7 Orang
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdiri dari:
   - ❖ Pendidikan S-2 : 6 orang
   - ❖ Pendidikan S-1 : 17 orang
   - ❖ Pendidikan SMA/ SMK : 3 orang
   - ❖ Pendidikan SMP : - orang
   - ❖ Pendidikan SD : - orang

1.1.3. VISI DAN MISI

❒ ***VISI***

Visi adalah pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga pada suatu waktu yang jauh ke depan. Visi organisasi yang ditetapkan menjadi visi bersama (*shared vision*) sehingga dapat membangun komitmen dan menggerakkan segala sumber daya organisasi, menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, menciptakan standar/tolok ukur keunggulan, dan sebagai motivasi pencapaian tujuan masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 dengan menetapkan arah kebijakan utama untuk mencapai sasaran yaitu **“Kabupaten Kediri yang Berakhlak, Berdaya Saing dan Sejahtera (KBBS)”**.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, dinyatakan bahwa Visi Kabupaten Kediri adalah “**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani.”**

❒ ***MISI***

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri mengemban Misi Pembangunan yang ketiga sebagai berikut:

"Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah"

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri disusun untuk memperbaiki hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja diharapkan program dan kegiatan dapat terlaksana lebih maksimal dan baik serta sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, permasalahan yang dihadapi dibidang penanaman modal dan berdasarkan harapan masyarakat.

❒ ***MAKSUD***

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Kediri pada tahun 2025, adalah :

Sebagai upaya perbaikan program dan kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD yang didasarkan hasil evaluasi selama Triwulan II, sesuai dengan rencana program prioritas.

❒ ***TUJUAN***

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini adalah :

- Untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam tahun 2025 maupun sebagai pengendalian untuk pelaksanaan tahun berjalan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perubahan Rencana Kerja SKPD disusun diharapkan sesuai dengan kriteria di bawah ini :

a. mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
b. mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
d. untuk menyelaraskan dengan kondisi dan kebutuhan terhadap prioritas program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025, berdasarkan pada sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3. Reviu terhadap Perubahan RKPD

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

3.2. Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2025

BAB IV : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS:

Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah, dengan Indikator Kinerja Utama yaitu :

a. Nilai Realisasi Investasi di Daerah, Indikator ini menunjukan jumlah investasi yang telah diwujudkan pada suatu daerah. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dari target yang direncanakan pada tahun 2025, sebesar Rp. 3.200.000.000.000 dengan realisasi triwulan I sebesar Rp. 444.832.374.901. Persentase capaian kinerja pertumbuhan investasi 13,90%. Ada kemungkinan penurunan tren investasi dikarenakan telah selesainya Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandara Dhoho. Sehingga perlu dilakukan evaluasi target indikator kinerjanya. Realisasi investasi mikro bulan Januari s.d. Maret Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 mengalami penurunan. Menindaklanjuti hal tersebut, DPMPTSP mendorong optimalisasi pelaporan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dengan memetakan potensi investasi yang belum terlaporkan melalui LKPM, Memetakan pengusaha yang belum memiliki izin melalui Kerjasama dengan sektor terkait, Evaluasi Target Kinerja dan pengembangan iklim investasi melalui kegiatan IPRO (*investment ready to offer*) maupun penyusunan peraturan daerah penanaman modal.
b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan. Indeks ini diperoleh melalui serangkai kegiatan dalam bentuk Survey Kepuasan masyarakat (SKM). Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan pada nilai indeks kepuasan masyarakat hasil survey. Pada triwulan I tahun 2025, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,71 dari target nilai sebesar 85,05. Dengan kata lain prosentase capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat sebesar 104,30. Berdasarkan hasil evaluasi Nilai terendah pada triwulan I tahun 2025 yaitu waktu pelayanan dan persyaratan. Berdasarkan analisa laporan pelayanan bulanan dan dibandingkan dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kediri, waktu pelayanan sudah sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP). Sehingga perlu adanya penambahan volume kegiatan

sosialisasi maupun publikasi terkait standard pelayanan maupun updating peraturan pelayanan perizinan. Efisiensi proses pelayanan dilakukan melalui kegiatan digitalisasi pelayanan perizinan melalui aplikasi “Kesatu”.

c. Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong, indikator ini ditunjukan dengan jumlah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar yang dituangkan dalam dokumen formal. Adapun jumlah kemitraan akan direalisasikan pada triwulan IV tahun 2025.

2.1.1. Analisis Terhadap Program – Kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan administrasi perkantoran berkaitan dengan tugas-tugas rutin kesekretariatan, sehingga proses kegiatan administrasi perkantoran dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dari segi anggaran dan penggunaannya/ realisasinya, maka pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan I untuk program ini dapat terealisasi sebesar 24,63% atau terserap sebesar Rp. 1.423.099.12. Dalam hal ini pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai triwulan I tahun anggaran 2025 dapat terselenggara dengan baik. Adapun penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan finalisasi pelaporan kinerja dan keuangan sampai triwulan I tahun 2025 dengan tepat waktu;
2. Pengeluaran dana yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan pegawai, penerimaan honorarium pegawai yang menjadi haknya telah diterima sesuai dengan Pedum yang telah ditetapkan dan dilaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
3. Penyediaan belanja rutin pengadaan barang dan jasa rumah tangga kantor, pemeliharaan kendaraan maupun peralatan/perlengkapan kantor sebagai sarana utama pelaksanaan tugas rutin. Pengadaan belanja modal pada periode renstra 2021-2026 untuk sarana prasarana pada Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kediri.
4. Biaya rapat-rapat koordinasi baik di dalam daerah maupun ke luar daerah, meliputi biaya konsumsi, transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan yang tertera di dalam pedoman umum penganggaran.

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada tahun 2025, program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, kegiatan tersebut didasarkan dana yang ada terealisasi sebesar Rp 3.720.000 dari alokasi dana Rp 408.614.800 dengan capaian persentase kinerja anggaran sebesar 0,91 %. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota,

   Maksud adanya kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan minat investor dalam melakukan penanaman modal di daerah. Pada tahun 2025, upaya meningkatkan investasi dan kemudahan usaha dilakukan dengan penyusunan raperda Penanaman Modal. Pada Triwulan I, progres kegiatan penyusunan raperda diantaranya:

   - Administrasi Rutin;
   - Pembahasan dan Revisi Draf Perda Penanaman Modal dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

   Pengembangan Data Potensi Daerah dimaksudkan untuk menyajikan data pengembangan dan peluang investasi daerah yang dapat ditawarkan kepada investor. Pada tahun 2025 kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan I yaitu:

   - Administrasi Rutin;

III. Program Promosi Penanaman Modal

Pada tahun 2025, program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sampai dengan triwulan I dana yang ada terealisasi sebesar Rp 320.000 dari alokasi dana Rp 415.569.800 dengan capaian persentase kinerja anggaran sebesar 0,08%. Adapun kegiatan dimaksud yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Promosi Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Kediri dilakukan dengan cara promosi melalui pameran dan promosi langsung ke investor. Pada triwulan I ini, kegiatan yang telah dilakukan diantaranya:

- Administrasi Rutin;

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pada tahun 2025, program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sampai dengan triwulan I dana yang ada terealisasi sebesar Rp 58.026.232 dari alokasi dana Rp 656.130.800 dengan capaian persentase kinerja anggaran sebesar 8,84 %. Adapun kegiatan dimaksud yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Pelayanan perizinan dilakukan secara online melalui oss.go.id dan penggunaan aplikasi KESATU. Selain pelayanan pada kantor DPMPTSP Kabupaten Kediri, untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat DPMPTSP melakukan pelayanan keliling Joss secara terjadwal ke desa-desa di Kabupaten Kediri.

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada tahun 2025, program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sampai dengan triwulan I dana yang ada terealisasi sebesar Rp 28.869.508 dari alokasi dana Rp 417.735.000 dengan capaian persentase kinerja anggaran sebesar 6,91 %. Adapun kegiatan dimaksud yaitu Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun maksud dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal serta meningkatkan investasi di daerah. Pada triwulan I ini, kegiatan yang telah dilakukan diantaranya:

- Jumlah perusahaan yang diawasi : 11 Kegiatan Usaha.

VI. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pada tahun 2025, program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sampai dengan triwulan I dana yang ada terealisasi sebesar Rp 12.160.200 dari alokasi dana Rp 154.307.400 dengan capaian persentase kinerja anggaran sebesar 7,88 %. Adapun kegiatan dimaksud yaitu Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun bentuk keluaran yang terealisasi yaitu:

- Publikasi Kegiatan dinas melalui media cetak dan online;
- Penggantian materi baliho DPMPTSP.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri disajikan pada tabel 2.1 dan tabel 2.2

Tabel : 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025			Target program/ kegiatan Renja PD 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=(10/4)*
2 18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
2 18 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**100**			**100**		
2 18 01 2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37 Laporan	36 laporan	10 dokumen	5 dokumen	50.00%	10 dokumen	51 dokumen	137.84%
2 18 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	8 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00%	2 Dokumen	11 Dokumen	84.62%
2 18 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	8 laporan	2 laporan	2 laporan	100.00%	2 laporan	12 laporan	100.00%
2 18 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	20 dokumen	6 Laporan	2 Laporan	33.33%	6 Laporan	28 Laporan	233.33%
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	18 dokumen	12 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	33.33%	3 dokumen	16 dokumen	88.89%
2 18 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	72 Bulan	48 bulan	12 bulan	3 bulan	25.00%	12 bulan	63 bulan	87.50%
2 18 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Bulan	48 bulan	12 bulan	3 bulan	25.00%	12 bulan	63 bulan	87.50%
2 18 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	4 Laporan	1 laporan	1 laporan	100.00%	1 laporan	6 laporan	100.00%
2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 laporan	8 laporan	2 laporan	0	0.00%	2 laporan	10 laporan	83.33%
2 18 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	12 laporan	8 laporan	2 laporan	0	0.00%	2 laporan	10 laporan	83.33%
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	0	0.00%	100		
2 18 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	18 orang	0	29 orang	0	0.00%	29 orang	29 orang	161.11%
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	21	21.00%	100	73.67	73.67%
2 18 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	240 komponen	165 komponen	40 komponen	0	0.00%	40 komponen	205 komponen	85.42%
2 18 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 peralatan	122 peralatan	5 peralatan	1 peralatan	20.00%	5 peralatan	128 peralatan	2560.00%
2 18 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 peralatan	16 peralatan	3 peralatan	1 peralatan	33.33%	3 peralatan	20 peralatan	83.33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025			Target program/ kegiatan Renja PD 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 18 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 barang cetakan	16 barang cetakan	2 barang cetakan	0	0.00%	2 barang cetakan	18 barang cetakan	75.00%
2 18 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 bahan	16 bahan	12 bahan	3 bahan	25.00%	12 bahan	31 bahan	129.17%
2 18 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	72 rapat	48 rapat	12 rapat	3 rapat	25.00%	12 rapat	63 rapat	87.50%
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	100	100	100	25	25.00%	100	75	75.00%
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa Surat Menyurat	72 bulan	48 bulan	12 bulan	3 bulan	25.00%	12 bulan	63 bulan	87.50%
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	72 bulan	48 bulan	12 bulan	3 bulan	25.00%	12 bulan	63 bulan	87.50%
2 18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 bulan	48 bulan	12 bulan	3 bulan	25.00%	12 bulan	63 bulan	87.50%
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	32 unit	21 unit	6 unit	2 unit	33.33%	6 unit	29 unit	90.63%
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	30 unit	20 unit	5 unit	2 unit	40.00%	5 unit	29 unit	96.67%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 gedung	1 gedung	0	0	0.00%	0	1 gedung	50.00%
2 18 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaku usaha yang diberikan insentif/ fasilitas di bidang penanaman modal**	**100**	**75**	**25**	**0**		**25**	**100**	**100.00%**
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	9 dokumen	10 dokumen	1 dokumen	0	0.00%	1 dokumen	11 dokumen	122.22%
2 18 02 2.01 0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen yang disusun atas kegiatan penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilatas/insentif dan kemudahan penanaman modal	3 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	0	0.00%	1 dokumen	6 dokumen	200.00%
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen yang disusun atas evaluasi pelaksanaan pemberian faslitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.	6 dokumen	4 dokumen		0	0.00%		4 dokumen	66.67%
2 18 02 2.01 0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	0	0	1 dokumen	0	0.00%	1 dokumen	2 dokumen	
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RUPM Peta potensi dan peluang usaha yang disusun	7 dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	0	0.00%	2 Dokumen	7 dokumen	100.00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025			Target program/ kegiatan Renja PD 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 18 02 2.02 0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten	2 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0	0.00%	1 Dokumen	3 Dokumen	150.00%
2 18 02 2.02 0004	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang usaha yang disusun.	7 dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	0	0.00%	1 Dokumen	5 Dokumen	71.43%
2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0.00%**	**100**	**66.66**	**66.66%**
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.	Jumlah media promosi market inteligent publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan	9 kegiatan	11 kegiatan	2 kegiatan	0	0.00%	2 kegiatan	13 kegiatan	144.44%
2 18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri	Jumlah kegiatan promosi ke Pengusaha/Investor yang dilaksanakan	6 kegiatan	12 kegiatan	2 kegiatan	0	0.00%	2 kegiatan	14 kegiatan	233.33%
2 18 03 2.01 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	3 dokumen	0	1 dokumen	0	0.00%	1 dokumen	1 dokumen	33.33%
2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu**	**100**	**100**	**100**	**106**	**106.00%**	**100**	**102**	**102.00%**
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.	Prosentase izin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai	80	77	79	84	106.33%	79	80	100.00%
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Jenis izin yang dilayani melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik	40 jenis	61 izin	0	0	0.00%	0	61 izin	152.50%
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	Jenis Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal (perizinan berusaha perizinan non berusaha)	45 jenis	34 jenis	0	0	0.00%	0	34 jenis	75.56%
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan.	Jenis dokumen terkait layanan perizinan dan pengaduan (Standar Pelayanan dan SKM) yang diterbitkan	7 jenis	5 jenis	0	0	0.00%	0	5 jenis	71.43%
2 18 04 2.01 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0	22.900 pelaku usaha	10000 Pelaku Usaha	2934 Pelaku Usaha	29.34%	10000 Pelaku Usaha	35.834 Pelaku Usaha	
2 18 04 2.01 0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0	3.184 orang	1000 Pelaku Usaha	0	0.00%	1000 Pelaku Usaha	4.184 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025			Target program/ kegiatan Renja PD 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**85**	**82**	**84**	**3**	**3.57%**	**84**	**56.33**	**66.27%**
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian	918 perusahaan	2115 perush.	474 perusahaan	11 perusahaan	2.32%	474 perusahaan	2600 perusahaan	283.22%
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen yang disusun	335 perusahaan	147 perush.	0	0	0.00%	0	147 perush.	43.88%
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pembinaan	290 perusahaan	1220 perush.	0	0	0.00%	0	1220 perush.	420.69%
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pengawasan.	298 perusahaan	149 perush.	0	0	0.00%	0	149 perush.	50.00%
2 18 05 2.01 0004	Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	0	74 Kegiatan Usaha.	14 Kegiatan Usaha.	0	0.00%	14 Kegiatan Usaha.	88 Kegiatan Usaha.	
2 18 05 2.01 0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0	440 pelaku usaha	400 pelaku usaha	0	0.00%	400 pelaku usaha	840 pelaku usaha	
2 18 05 2.01 0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	0	65 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	11 Kegiatan Usaha	18.33%	60 Kegiatan Usaha	136 Kegiatan Usaha	
2 18 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**100**	**100**	**100**	**33**	**33.00%**	**100**	**77.67**	**77.67%**
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.	Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan	18 Jenis (buku website sosialisasi perizinan)	16 jenis	3 Jenis (buku website sosialisasi perizinan publikasi)	1 Jenis (publikasi)	33.33%	3 Jenis (buku website sosialisasi perizinan publikasi)	20 jenis	111.11%
2 18 06 2.01 002	Pengelolaan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Jenis penyajian data dan penyampaian informasi perizinan dan non perizinan.	6 buku 6 website 310 peserta	12 jenis	3 jenis	1 jenis	33.33%	3 jenis	16 jenis	88.89%

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMPTSP
KABUPATEN KEDIRI

NO.	Indikator Kinerja	SPM/ Standard Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 sd TW I	Tahun 2025	
1	2	3	4	7	8	8	8	9	10	12	13
1	Prosentase pertumbuhan investasi di daerah	-	Ada	6,00%	7,00%	8,00%	8,00%	29,99 %	2.21%	3.01%	Nilai Investasi Tahun 2024 sebesar Rp. 20.090.644.396.746; Realisasi Investasi Tahun 2025 sd Triwulan I sebesar Rp. 20.535.476.771.647
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Perizinan	-	Ada	79.65	84.70	85.05	79.75	85,05	88,71	88.71	
3	Nilai realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	-	Ada	736.06	3,200.00	3,200.00	850.59	4,636.22	444.83	1587.70	
4	Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong	-		1 MoU	1 MoU	3 MoU	1 MoU	12 MoU/ Pernyataan Minat	-	3 MoU	

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diantaranya:

1. Belum optimalnya digitalisasi, proses perizinan masih lambat karena kurangnya integrasi sistem, verifikasi manual serta masih bergantung pada proses fisik (Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tahun 2025);
2. Konsistensi keberadan dan kualitas pelayanan dari bentuk inovasi yang telah dilakukan dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan PB kepada Masyarakat (Penilaian Mandiri PTSP);
3. Belum adanya peraturan tentang kemudahan insentif;
4. Perlunya Peningkatan Kompetensi di bidang penanaman modal dan Kompetensi Pendukung (Penilaian Mandiri PTSP);
5. Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kediri.

Untuk mengatasi Isu penting/ permasalahan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), telah menuangkannya dalam program/ kegiatan/ sub kegiatan pada rencana kerja tahun 2025. Kemudian pada perubahan rencana kerja tahun 2025, dilakukan penyesuaian strategi pelayanan dengan dinamika kebutuhan investasi, regulasi terbaru, dan evaluasi kinerja. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mengatasi isu penting diatas diantaranya:

1. Digitalisasi pelayanan perizinan berusaha telah dilakukan melalui portal https://oss.go.id/ serta untuk pelayanan perizinan daerah dilakukan melalui aplikasi KESATU https://kesatu.kedirikab.go.id/. Pada aplikasi KESATU, pengajuan dilakukan secara online dan verfikasi antar dinas telah terintegrasi dalam aplikasi ini. Selanjutnya aplikasi KESATU yang telah diujicobakan pada Bulan Januari 2025 masih dalam proses penyempurnaan;
2. Inovasi Pelayanan telah dilakukan diantaranya, pelayanan keliling joss, Sistem Informasi Data Potensi Investasi Terintegrasi Kabupaten Kediri (SIDAPOTIK), Klinik Layanan Investasi Kabupaten Kediri (K-LINKED) dan terbaru aplikasi Kediri Satu Pintu (KESATU);
3. Peraturan Daerah terkait Penanaman Modal menunggu pembahasan dari Legislatif, adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peningkatan Kompetensi di Bidang Penanaman Modal akan diusulkan menunggu informasi dari Pusdiklat Kementerian Investasi dana Hilirisasi/ BKPM. Untuk Peningkatan Kompetensi Pendukung dianggarkan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025;

5. Kebutuhan pendukung sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kediri dianggarkan secara bertahap.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri diantaranya:

1. Penurunan tren investasi dikarenakan telah selesainya Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandara Dhoho, sehingga dibutuhkan strategi meningkatkan investasi di Kabupaten Kediri Ketika tidak ada proyek strategis nasional;
2. Berdasarkan hasil evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Nilai terendah pada triwulan I tahun 2025 yaitu waktu pelayanan dan persyaratan. Berdasarkan analisa laporan pelayanan bulanan dan dibandingkan dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kediri, waktu pelayanan sudah sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP). Sehingga dibutuhkan penyamaan persepsi antara pelayanan yang dilayani melalui sosialisasi/ publikasi terkait standard pelayanan dll.

Dampak Permasalahan dan hambatan apabila tidak ditemukan solusinya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, SPM yaitu adanya penurunan pada penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kediri, khususnya pada Indikator Kinerja Kunci Bidang Penanaman Modal “Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota”.

Berikut analisis tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri, khususnya dalam konteks tidak adanya proyek strategis nasional (PSN) seperti bandara:

A. TANTANGAN
    1. Minimnya Daya Tarik Investasi Skala Besar. Dengan tidak adanya Proyek Strategis Nasional (PSN), Kabupaten Kediri kesulitan menarik investor besar yang biasanya mengandalkan infrastruktur strategis. Sehingga Realisasi investasi didominasi sektor kecil-menengah (UMKM), yang nilai investasinya relatif rendah;
    2. Kabupaten Kediri bersaing dengan Kabupaten/Kota sekitar yang memiliki Proyek Strategis Nasional (PSN)/ Kawasan Ekonomi Khusus;
B. PELUANG
    1. Pengembangan Sektor Unggulan Lokal, hilirisasi sektor unggulan dengan dukungan perizinan cepat;
    2. Digitalisasi Layanan
    3. Kemudahan Penanaman Modal/ Kemudahan Fiskal

Berikut formulasi isu strategis, rekomendasi, dan catatan prioritas untuk penyusunan program/kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025, dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang diantaranya:

NO	ISU	REKOMENDASI
1.	Minimnya Investasi Skala Besar Tanpa Proyek Strategis Nasional (PSN)	1. Optimalisasi pelaporan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dengan memetakan potensi investasi yang belum terlaporkan melalui LKPM; 2. Memetakan pengusaha yang belum memiliki izin melalui Kerjasama dengan sektor terkait; 3. Evaluasi Target Kinerja; 4. Pengembangan iklim investasi melalui kegiatan IPRO (*investment ready to offer*) – Upaya Pengembangan klaster industri lokal; 5. Penyusunan peraturan daerah penanaman modal
2.	Digitalisasi Layanan	1. Penyempurnaan aplikasi Kediri Satu Pintu (KESATU) 2. Evaluasi layanan pengaduan (sms gateway, media sosial maupun google review)

2.3. Reviu Terhadap Perubahan RKPD

Berikut reviu terhadap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri, tersaji pada tabel 2.3 berikut.

Tabel : 2.3

REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN KEDIRI

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

NO	PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP. 000)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**8,207,134.694**					**8,207,134.694**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**6,845,743.354**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**6,845,743.354**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 dokumen**	**441.800**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 dokumen**	**441.800**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kediri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	154.200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kediri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	154.200	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	143.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	143.800	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	143.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	143.800	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**3 dokumen**	**5,557,790.492**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah**	**3 dokumen**	**5,557,790.492**	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kediri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	4,820,570.189	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kediri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	4,820,570.189	
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kediri dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	737,146.303	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kediri dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	737,146.303	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	74.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	74.000	
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**2 laporan**	**143.800**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**2 laporan**	**143.800**	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	143.800	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	143.800	
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**22,200.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**22,200.000**	
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 Orang	22,200.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 Orang	22,200.000	

NO	PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP. 000)	
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1,074,404.826**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**1,074,404.826**	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kediri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket (40 komponen)	1,497.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kediri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket (40 komponen)	1,497.600	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kediri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,011,194.126	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kediri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1,011,194.126	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kediri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	9,432.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kediri	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	9,432.000	
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kediri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3,415.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kediri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3,415.700	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kediri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8,902.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kediri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8,902.400	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	39,963.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	39,963.000	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan**	**100%**	**159,762.436**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan**	**100%**	**159,762.436**	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,750.000	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	104,792.436	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	104,792.436	
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	49,220.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kediri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	49,220.000	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**4 unit**	**31,000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**4 unit**	**31,000.000**	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kediri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	31,000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kediri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	31,000.000	
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		**Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal**	**25%**	**263,877.800**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		**Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal**	**25%**	**263,877.800**	
8	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**		**Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal**	**2 dokumen**	**69,082.800**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**		**Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal**	**2 dokumen**	**69,082.800**	
19	Penetapan kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.	Kab. Kediri	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 dokumen	46,017.800	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kediri	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 dokumen	46,017.800	

NO	PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP. 000)	
20	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	23,065.000	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	23,065.000	
9	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun**	**2 dokumen**	**194,795.000**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun**	**2 dokumen**	**194,795.000**	
21	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	5,476.500	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	5,476.500	
22	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	189,318.500	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	189,318.500	
III	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		**Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan**	**100%**	**249,987.300**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		**Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan**	**100%**	**249,987.300**	
10	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.**		**Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan**	**2 kegiatan**	**249,987.300**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.**		**Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan**	**2 kegiatan**	**249,987.300**	
23	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri	Kab. Kediri dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	179,394.300	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri	Kab. Kediri dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	179,394.300	
24	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	70,593.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kediri	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	70,593.000	
IV	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu**	**100%**	**465,847.000**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu**	**100%**	**465,847.000**	
11	**Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.**		**Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai**	**79%**	**465,847.000**	**Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.**		**Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai**	**79%**	**465,847.000**	
25	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kediri	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10000 Pelaku Usaha	461,147.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kediri	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10000 Pelaku Usaha	461,147.000	
26	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Kediri	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	75 Pelaku Usaha	4,700.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan.	Kab. Kediri	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	75 Pelaku Usaha	4,700.000	
V	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**84%**	**275,886.200**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		**Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**84%**	**275,886.200**	

NO	PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP. 000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP. 000)	
12	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**		**Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian**	**474 perusahaan**	**275,886.200**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**		**Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian**	**474 perusahaan**	**275,886.200**	
27	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Kediri	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha	23,548.300	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Kediri	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10 Kegiatan Usaha	23,548.300	
28	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Kediri	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	161,127.600	-	Kab. Kediri	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	161,127.600	
29	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kediri	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	91,210.300	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Kediri	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	91,210.300	
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		**Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**100 persen**	**105,793.040**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		**Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**100 persen**	**105,793.040**	
13	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.**		**Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan**	**2 jenis**	**105,793.040**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.**		**Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan**	**2 jenis**	**105,793.040**	
30	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kediri	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	105,793.040	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kediri	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	105,793.040	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun 2025, tidak ada program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi. Tabel 2.4.

Tabel : 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KABUPATEN KEDIRI

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			N I H I L		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA SKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Pasal 11 ayat (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Renstra Perangkat Daerah; dan
b. Renja Perangkat Daerah.

Mengacu dan memperhatikan peraturan dimaksud, dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan perlu melakukan evaluasi hasil capaian kinerja, analisis maupun *review* terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga dapat disimpulkan langkah-langkah yang harus diambil untuk penyelenggaraan program kegiatan guna pencapaian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

3.1.1 TUJUAN

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini adalah:

1) Untuk memperbaiki / menyesuaikan dengan kondisi yang ada atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja awal agar pada akhir periode Tahun Anggaran capaian kinerja dapat maksimal, baik dari sisi pelaksanaan fisik maupun keuangan;

2) Untuk memudahkan evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan hasil yang diharapkan ;
3) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
4) Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi bagi para pelaksana kegiatan di daerah.

3.1.2 SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini adalah:

1) Tersinkronisasinya program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional di bidang penanaman modal dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP.
2) Terakomodirnya program dan kegiatan yang menjadi usulan dari masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
3) Meningkatnya nilai investasi di daerah dan minat investor dari berbagai daerah untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri.

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Rincian Program kegiatan dan jumlah kebutuhan dana yang terdiri dari 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan. Rekapitulasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEDIRI

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025		Pagu			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana
1		3	6				7	8	9	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**5,777,067,579.00**	**6,845,743,354.00**	**(642,400.00)**	**DAU**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*10 Laporan*	*10 laporan*	*10 dokumen*	*10 Laporan*	*923,500.00*	*441,800.00*	*(481,700.00)*	*DAU*
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	314,500.00	154,200.00	(160,300.00)	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	304,500.00	143,800.00	(160,700.00)	DAU
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 Laporan	6 dokumen	304,500.00	143,800.00	(160,700.00)	DAU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	*3 dokumen*	*3 dokumen*	*3 dokumen*	*3 dokumen*	*4,418,028,117.00*	*5,557,790,492.00*	*1,139,762,375.00*	*DAU*
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	20 Orang/bulan	19 Orang/bulan	20 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3,530,483,817.00	4,820,570,189.00	1,290,086,372.00	DAU
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	887,394,300.00	737,146,303.00	(150,247,997.00)	DAU
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	150,000.00	74,000.00	(76,000.00)	DAU
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	*287,600.00*	*143,800.00*	*(143,800.00)*	*DAU*
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	287,600.00	143,800.00	(143,800.00)	DAU
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	100	100	133,200,000.00	22,200,000.00	*(111,000,000.00)*	*DAU*
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	6 Orang	32 Orang	133,200,000.00	22,200,000.00	(111,000,000.00)	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*923,668,113.00*	*1,074,404,826.00*	*150,736,713.00*	*DAU*
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 paket (40 komponen)	1 Paket	1,497,600.00	1,497,600.00	0.00	DAU
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	5 Paket	5 Paket	831,179,313.00	1,011,194,126.00	180,014,813.00	DAU
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	11,928,000.00	9,432,000.00	(2,496,000.00)	DAU
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	2 Paket	3 Paket	7,051,800.00	3,415,700.00	(3,636,100.00)	DAU

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025		Pagu			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana
1		3	6				7	8	9	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8,902,400.00	8,902,400.00	0.00	DAU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	63,109,000.00	39,963,000.00	(23,146,000.00)	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*273,960,249.00*	*159,762,436.00*	*(114,197,813.00)*	*DAU*
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8,500,000.00	5,750,000.00	(2,750,000.00)	DAU
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	123,800,249.00	104,792,436.00	(19,007,813.00)	DAU
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	141,660,000.00	49,220,000.00	(92,440,000.00)	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara*	*5 unit*	*5 unit*	*6 unit*	*4 unit*	*27,000,000.00*	*31,000,000.00*	*4,000,000.00*	*DAU*
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	5 unit	5 unit	5 unit	4 unit	27,000,000.00	31,000,000.00	4,000,000.00	DAU
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal**	**25%**	**25,00**	**25%**	**25%**	**408,614,800.00**	**263,877,800.00**	**(144,737,000.00)**	**DAU**
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal*	*2 dokumen*	*2 dokumen*	*1 dokumen*	*1 dokumen*	*167,044,600.00*	*69,082,800.00*	*(97,961,800.00)*	*DAU*
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen yang disusun atas kegiatan penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilatas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	116,717,400.00	46,017,800.00	(70,699,600.00)	DAU
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		0	1 Dokumen		50,327,200.00	23,065,000.00	(27,262,200.00)	DAU
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun*	*2 dokumen*	*2 dokumen*	*2 dokumen*	*2 dokumen*	*241,570,200.00*	*194,795,000.00*	*(46,775,200.00)*	*DAU*
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*	*1 dokumen*	*1 dokumen*	*1 dokumen*	*1 dokumen*	*20,032,700.00*	5,476,500.00	(14,556,200.00)	DAU
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	221,537,500.00	189,318,500.00	(32,219,000.00)	DAU
III	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**415,569,800.00**	**249,987,300.00**	**(553,477,000.00)**	**DAU**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025		Pagu			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana
1		3	6				7	8	9	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan*	*2 kegiatan*	*2 kegiatan*	*2 kegiatan*	*2 kegiatan*	*415,569,800.00*	*249,987,300.00*	*(165,582,500.00)*	*DAU*
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi (pameran investasi, matchmaking dan bussiness gathering) yang dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	335,569,500.00	179,394,300.00	(156,175,200.00)	DAU
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		0	1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,300.00	70,593,000.00	(9,407,300.00)	DAU
IV	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**656,130,800.00**	**465,847,000.00**	**(387,894,500.00)**	**DAU**
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai*		*100%*	*79%*	*79%*	*656,130,800.00*	*465,847,000.00*	*(190,283,800.00)*	*DAU*
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10000 pelaku usaha	22900 pelaku usaha	10000 pelaku usaha	10000 pelaku usaha	556,150,800.00	461,147,000.00	(95,003,800.00)	DAU
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 orang	3184 orang	1000 orang	75 orang	99,980,000.00	4,700,000.00	(95,280,000.00)	DAU
V	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan**	**83%**	**10176%**	**83%**	**83%**	**417,735,000.00**	**275,886,200.00**	**(197,610,700.00)**	**DAU**
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian*	*474 Perusahaan*	*579 Perusahaan*	*474 Perusahaan*	*474 Perusahaan*	*417,735,000.00*	*275,886,200.00*	*(141,848,800.00)*	*DAU*
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	14 Kegiatan Usaha	74 Kegiatan Usaha	14 Kegiatan Usaha	5 Kegiatan Usaha	28,130,100.00	23,548,300.00	(4,581,800.00)	DAU
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 pelaku usaha	440 pelaku usaha	400 pelaku usaha	350 pelaku usaha	242,632,700.00	161,127,600.00	(81,505,100.00)	DAU

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2025		Pagu			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana
1		3	6				7	8	9	
	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 Kegiatan Usaha	65 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	146,972,200.00	91,210,300.00	(55,761,900.00)	DAU
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**154,307,400.00**	**105,793,040.00**	**(48,514,360.00)**	**DAU**
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan*	*4 Jenis (buku, website , sosialisasi perizinan, publikasi)*	*4 jenis*	*4 Jenis (buku, website , sosialisasi perizinan, publikasi)*	*2 Jenis (buku, publikasi)*	*154,307,400.00*	*105,793,040.00*	*(48,514,360.00)*	*DAU*
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	154,307,400.00	105,793,040.00	(48,514,360.00)	DAU
							7,829,425,379.00	**8,207,134,694.00**	**377,709,315.00**	

BAB IV
P E N U T U P

Di dalam laporan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Tahun 2025 sampai dengan triwulan I serta Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025 ini merupakan perubahan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

Besaran rancangan pagu indikatif pendanaan atas rencana program dan kegiatan selama Tahun 2025 memang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam kurun waktu pelaksanaan rencana kerja sangat dimungkinkan adanya perubahan situasi dan kondisi yang tidak mampu terdeteksi saat awal perencanaan, baik faktor alam, kebutuhan internal/eksternal, maupun kemampuan pembiayaan atas program dan kegiatan. Bila hal ini terjadi, maka perubahan atas rencana kerja akan sangat dimungkinkan. Pada kondisi seperti ini evaluasi atas rencana program dan kegiatan merupakan hal yang sangat penting dan tetap senantiasa dilakukan dengan tetap mengacu pada proiritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025.

Pelaksanaan atau penerapan atas rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri mengacu pada beberapa kaidah, yaitu:

a. Dokumen merupakan dasar penetapan penyusunan belanja kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 yang menetapkan belanja hingga sampai pada operasional belanja yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan dan Sub Kegiatan;

b. Dalam kurun waktu pelaksanaan rencana kerja perlu senantiasa dilakukan evaluasi untuk menjawab perubahan situasi dan kondisi yang tidak mampu terdeteksi pada awal perencanaan. Evaluasi juga sebagai alat ukur ketercapaian (efektifitas) pelaksanaan program dan kegiatan;
c. Apabila terjadi perubahan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025, maka kaidah yang diambil adalah memprioritaskan yang lebih proiritas dan mendahulukan yang mendesak untuk didahulukan, dengan tetap mengacu pada proiritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025;
d. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025 harus dilaksanakan secara transparan, terukur, efektif-efisien dan akuntabel.

Dengan adanya Perubahan Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program/ kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, - - 2025
KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN KEDIRI

JOKO SUWONO

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA